

RINGKASAN
NASKAH AKHIR
PIDATO
Tgl 9 Juli 2014



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANGIV
TAHUN SIDANG 2013-2014**

KAMIS, 10 JULI 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2014**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2013-2014
KAMIS, 10 JULI 2014**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- Para Wakil Ketua DPR-RI,
- Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan;
- Pimpinan Fraksi-fraksi;
- Para Anggota Dewan;

Bismillahirrohmanirohim, alhamdulillahirobbil'alamin, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, dan atas hidayah-Nya hari ini kita dapat menyelesaikan kegiatan Dewan hingga sampai pada agenda Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014.

Mengawali sidang ini, izinkanlah Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H", bagi segenap umat Islam dan khususnya bagi para

anggota Dewan. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah ini secara khusuk. Dengan datangnya bulan suci Ramadhan, diharapkan, sedikit banyak dapat meredam suasana yang agak meninggi akhir-akhir ini, sebagai akibat berlangsungnya Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014. Insya Allah, Ramadhan dapat memberikan rasa damai, tenteram, dan memunculkan sikap untuk saling menghargai dan menghormati di antara sesama warga masyarakat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Masa Sidang IV yang telah dimulai sejak 12 Mei lalu dan ditutup hari ini, telah berjalan selama 41 hari kerja dengan kegiatan yang cukup padat. Selain menjalankan fungsi-fungsi di bidang legislasi, dan di bidang pengawasan, pelaksanaan fungsi di bidang anggaran cukup intensif dilaksanakan, yaitu pembahasan dan penyelesaian atas RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014, pembahasan terhadap Pembicaraan Pendahuluan APBN 2015, dan mulai dibahas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada masa sidang ini Dewan telah mengesahkan 8 (delapan) RUU, baik RUU Prioritas Prolegnas maupun RUU Kumulatif Terbuka. DPR telah

menyelesaikan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Dengan Undang-undang ini dimaksudkan juga untuk menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak azasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

DPR juga telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk disahkan menjadi UU, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dewan berharap, pembentukan daerah otonomi baru ini harus benar-benar dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik, dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dapat memberikan kemampuan daerah dalam pemanfaatan potensi di daerahnya.

Selanjutnya, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2014. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, Dewan berharap kedua negara dapat saling mendukung dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

RUU Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki telah pula mendapat persetujuan paripurna Dewan. Bagian-bagian penting dalam persetujuan tentang kerja sama industri pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, telah disampaikan oleh Pimpinan Komisi I, diantaranya pembentukan komite bersama dalam industri pertahanan dan adanya komitmen para pihak untuk mengedepankan keamanan dan integritas masing-masing negara.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Salah satu RUU yang dibahas sangat intensif dalam Masa Sidang IV ini adalah RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU-MD3). RUU ini akhirnya mendapatkan persetujuan secara aklamasi dalam Rapat Paripurna pada 8 Juli 2014 malam, tanpa dihadiri oleh 3

fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Visi utama perubahan UU MD3 diarahkan bagi terwujudnya Parlemen yang produktif, efektif dan akuntabel. Sejalan dengan pemikiran visi di atas, inti dari substansi baru penguatan kelembagaan dilakukan dengan melakukan penataan, restrukturisasi, remodifikasi kelembagaan dan pelaksanaan hak-hak, tugas dan wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memperkuat dan memperjelas beberapa substansi yaitu penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi DPR, penguatan peran Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan DPR yang bertugas menjaga integritas dan kewibawaan anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Juga, dilakukan penataan tugas dan fungsi Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan penyempurnaan mekanisme pembentukan UU. Penguatan kelembagaan DPR juga perlu diiringi dengan penguatan Sistem Pendukung melalui penegasan terhadap pembentukan Badan Keahlian DPR.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam Masa Persidangan IV ini, DPR juga telah menyetujui beberapa RUU inisiatif DPR yaitu RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Sistem Perbukuan, RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang

Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, RUU tentang Kebudayaan, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan tambahan dari RUU Prolegnas Prioritas tahun 2014 di samping RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Substansi perubahan UU tentang Perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kejahatan dalam bentuk kekerasan dan seksual terhadap anak pada beberapa bulan terakhir. Upaya revisi UU tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masa depan generasi yang akan datang dari segala bentuk kekerasan.

Masih berkaitan dengan fungsi legislasi, baru-baru ini, Dewan terkejut dengan keluarnya putusan MK yang membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. UU ini dibahas sangat serius oleh DPR bersama Pemerintah dan bahkan mengalami beberapa kali perpanjangan masa tugas. Putusan MK telah membatalkan secara keseluruhan terhadap UU ini, karena dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, MK juga memutuskan UU Perkoperasian yang lama yaitu UU No. 25 Tahun 1992 kembali berlaku sebagai acuan dasar hukum yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi di seluruh Indonesia.

Dewan juga berupaya agar revisi atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dapat segera terselesaikan menyusul UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan telah menyelesaikan pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Secara garis besar kesepakatan yang dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 5,5%; Inflasi 5,3%; nilai tukar Rupiah Rp. 11.600,- per dolar AS; Lifting minyak bumi 818.000 per barel; Lifting gas bumi sebesar 1.240.000 barel per hari setara minyak bumi. Sedangkan defisit anggaran disepakati menjadi sebesar 2,4% dari PDB. Dewan juga sepakat dilakukannya pengurangan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, serta belanja lainnya agar kesinambungan dan keamanan fiskal APBN 2014 dapat

terjaga. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2014.

Dalam masa sidang ini Komisi dan Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 harus sesuai dengan misi dan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 tema RKP tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan”.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Adapun pelaksanaan fungsi Dewan di bidang pengawasan, dalam Masa Sidang ini tetap berjalan intensif, dilakukan oleh Komisi-Komisi bersama pasangan kerja masing-masing. Komisi II telah mengkritisi kinerja KPU dan Bawaslu pada saat pelaksanaan Pileg 9 April dan pembahasan serta persiapan pelaksanaan Pilpres 2014. Komisi-Komisi lain juga membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dibahas dan dicari solusi pemecahannya. Komisi XI telah menyelesaikan *fit and proper test* calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 24 Juni 2014 yang lalu. DPR

juga telah memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap pencalonan Duta-Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia yaitu Duta Besar Kerajaan Denmark, Kerajaan Belgia, Mongolia, Republik Persatuan Tanzania, Jepang, Kerajaan Swedia dan Republik El Salvador.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kita patut bersyukur kehadiran Allah SWT., bahwa sepanjang hari Rabu 9 Juli 2014, Bangsa Indonesia telah melaksanakan perhelatan demokrasi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden akan menentukan arah kehidupan negeri kita untuk lima tahun ke depan. Di dalam alam demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dapat dibenarkan, tetapi bukan untuk saling memunculkan perpecahan.

Dalam masa kampanye, memang ada beberapa kasus yang cukup memprihatinkan karena adanya sikap yang berseberangan antar pendukung. *Alhamdulillah*, proses Pilpres telah berlangsung dengan aman, lancar dan terkendali. Pilpres ini menjadi sarana bagi proses pendidikan masyarakat dalam berdemokrasi dan mengimplementasikan nilai-nilai universal demokrasi yang berupa kesetaraan, keadilan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara melalui cara-cara yang beradab.

Angka yang diperoleh barulah dari hasil hitung cepat. Kita masih menunggu perhitungan resmi yang akan diumumkan oleh KPU sepuluh hari ke depan, yang akan menetapkan Presiden/Wakil Presiden terpilih untuk kurun waktu 2014-2019. Setelah pengumuman resmi, semua pihak diharapkan menerima hasil pilihan rakyat dengan baik, dengan tetap menjaga situasi kondusif yang merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa.

Masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan yaitu mengawasi dan memantau perhitungan suara, yang harus dilakukan dengan cermat, jujur dan transparan. Kita tidak menginginkan terjadinya kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pilpres 2014 cukup mendapatkan perhatian dari negara-negara sahabat. Mereka memberikan apresiasi dan menghormati proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, dan memuji bahwa pelaksanaan demokrasi yang berjalan diyakini membawa manfaat bagi Indonesia di berbagai sektor. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan mampu menciptakan stabilitas politik.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Di bidang penegakan hukum kita melihat konsistensi para penegak hukum dalam menegakkan keadilan sebagaimana terlihat dalam vonis hukuman seumur hidup bagi mantan Ketua MK. Hukuman yang sangat berat ini dipastikan membuat efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia, yang telah menjadi musuh nomor satu dan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, sikap tanpa kompromi yang didukung oleh konsistensi para penegak hukum, wajib di kedepankan.

Hal lain yang menjadi perhatian Dewan adalah pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan ini dan persiapan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketersediaan bahan pangan, khususnya sembilan bahan pokok sangat penting. Pemerintah harus menjamin stok pangan dan menjaga stabilitas harga sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Dewan mendukung Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Rakor stabilisasi harga pangan juga merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebesar 5,3% sampai akhir 2014. Masalah transportasi massal menjelang Hari Raya Idul Fitri juga perlu

mendapat perhatian, termasuk dalam meminimalisir jumlah kecelakaan yang senantiasa terjadi tiap tahunnya.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hari-hari ini jalur Gaza yang memanas kian memprihatinkan menyusul operasi militer Israel terhadap Hamas yang telah menimbulkan korban jiwa di pihak sipil, terutama terbunuhnya wanita dan anak-anak. Situasi ini tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi juga akan memunculkan perang terbuka. Melihat aksi kekerasan ini, kita tidak lagi bicara tentang perbedaan agama, muslim dan non-muslim, namun kita harus melihat pada satu sisi, yaitu sisi kemanusiaan, karena perang terbuka dipastikan akan membawa korban besar terutama perempuan dan anak yang tidak berdosa.

Dewan mengecam semua bentuk kekerasan, baik yang dilakukan Palestina maupun Israel. Dewan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran serta menyatakan sikap keras agar perang terbuka antara kedua pihak tidak terjadi. Dewan bertekad untuk bekerjasama dengan OKI, guna menyatakan sikap dan memberikan dukungan kongkret bagi terwujudnya perdamaian kedua pihak yang berdampak pada keamanan kawasan. *(Do'a dipimpin Ketua)*

Terwujudnya kawasan yang aman, damai dan stabil telah menjadi cita-cita negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berbagai kesepakatan kerjasama, berbagai dialog, dan juga perundingan telah dilakukan demi mewujudkan cita-cita terbentuknya masyarakat ASEAN 2015. Dewan bersama-sama Pemerintah memanfaatkan berbagai jalur diplomasi untuk terus menciptakan rasa saling percaya dan mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa agar terwujud stabilitas dan keamanan kawasan

Selain kegiatan sebagaimana kami uraikan sebelumnya maka dalam masa sidang ini diplomasi Parleментар telah berjalan secara efektif. Selain DPR telah mengirimkan delegasi ke berbagai Sidang Regional, DPR juga telah menjadi tuan rumah *The Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Asian Parliamentary Assembly (APA)* yang berlangsung di Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan 12 negara APA, yaitu : Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Srilangka, Bahrain, Yordania, Iran, Kamboja, Turki, Malaysia, Siprus, dan RRT. Sidang APA yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR, Dr. Pramono Anung telah berlangsung dinamis dan konstruktif dan telah menghasilkan empat rancangan resolusi atas usul Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Pleno APA beberapa bulan kedepan.

Selain penyelenggaraan sidang tersebut, dalam masa sidang ini, DPR RI telah mengirimkan berbagai delegasi ke sidang regional, antara lain (1) menghadiri *Preparatory Meeting* dan *ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives* di Myanmar, (2) Sidang ke-10 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace* di Laos, (3) *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Political Affairs* di Ankara–Turki, (4) 1st APA Troika, Islamabad–Pakistan, (5) AIPA Caucus, 17–20 Juni 2014 di Brunei Darussalam.

BKSAP dan Grup Kerjasama Bilateral/GKSB DPR RI telah melakukan kunjungan kerjasama ke beberapa negara. Di samping itu pada bulan Agustus DPR RI juga akan menerima kunjungan Delegasi Parlemen negara sahabat, yaitu: Kunjungan Delegasi Liga Persahabatan Parlemen Peru–Indonesia; delegasi Senat Meksiko yang akan turut serta menghadiri Pidato Presiden RI di gedung DPR RI dan rencana kunjungan delegasi Kelompok Persahabatan Parlemen Kuwait-Indonesia yang akan datang sekitar awal September.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013-2014. Besok, DPR RI akan menjalani Masa Reses sampai

dengan 15 Agustus 2014, kami mengharapkan bahwa hari-hari akhir masa bhakti DPR ini kita masih mampu untuk berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. *Insyah Allah*, Tuhan akan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada bangsa Indonesia. *Aamiin yaa robbal 'alamin*. Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2014

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DR. H. Marzuki Alie